



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah  
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>  
**FACTUM**: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 12(2), 257-276



RESEARCH ARTICLE

---

---

## RAGAM PENDIDIKAN GURU MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA

**Yeni Kurniawati, Ayi Budi Santosa**

*Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia*  
[yenikurniawati@upi.edu](mailto:yenikurniawati@upi.edu)

---

---

**To cite this article:** Kurniawati Y., & Santosa, A.B. (2023). Ragam pendidikan guru masa pemerintahan kolonial belanda. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(2), 257-276. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i2.64131>.

---

---

### Abstract

This article aims to describe the pattern of teacher education during the Dutch Colonial period, which was adapted to the colonial education system. This research uses historical methods with heuristic steps (source search), source verification (internal and external criticism), interpretation, and historiography. The sources used are archives from ANRI (National Archives of the Republic of Indonesia), the KTLV Library, and the National Library. Apart from that, the primary source used is *Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indië Loopende over de Jaren 1893 t/m 4*. At the beginning of the 20th century, the Dutch East Indies government established many schools that needed skilled teaching staff. *Kweekschool* was founded to meet the needs of native teachers for existing schools at that time. Apart from teacher education called *kweekschool*, there are also other teacher schools such as *Hogere Kweekschool* (HKS), *Hollands Inlandsche Kweekschool* (HIK), *Hollands Chinese Kweekschool* (HCK), and *Hoofdakte Course*. In 1907, the teacher education program was extended from four to six years, and the Dutch began establishing advanced teacher schools, *Hoogere Kweekschool* (HKS) in 1914 in Bandung and Purworejo.

### Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pola pendidikan guru masa Kolonial Belanda yang disesuaikan dengan sistem Pendidikan kolonial. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan langkah-langkah heuristik (pencarian sumber), verifikasi sumber (kritik internal dan eksternal), interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan adalah arsip dari ANRI (Arsip nasional republik Indoneisa), perpustakaan KTLV, serta perpustakaan nasional. Selain itu, Sumber primer yang digunakan berupa *Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indië Loopende over de Jaren 1893 t/m 4*. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah sehingga membutuhkan tenaga pendidik yang ahli. *Kweekschool* didirikan untuk memenuhi kebutuhan guru bumiputera bagi sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu. Selain pendidikan guru yang bernama *kweekschool*, berdiri juga sekolah guru lainnya seperti, *Hogere Kweekschool* (HKS), *Hollands Inlandsche Kweekschool* (HIK), *Hollands Chinese Kweekschool* (HCK), dan *Kursus Hoofdakte*. Pada tahun 1907, program pendidikan guru diperpanjang dari empat menjadi enam tahun dan Belanda mulai mendirikan sekolah guru tingkat lanjut, *Hoogere Kweekschool* (HKS) pada 1914 di Bandung dan Purworejo.

© 2023 Universitas Pendidikan Indonesia

### Article Info

Article History:  
Received 14 Jun 2023  
Revised 16 Jul 2023  
Accepted 28 Jul 2023  
Available online 08 Oct 2023

### Keyword:

Europeese Kweekschool  
Hogere Kweekschool  
Hollands Inlandse  
Kweekschool  
Kweekschool  
Normaalschool

## PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan, mereka tidak hanya berperan memberikan pengajaran pada siswa tetapi juga menunjukkan kiprahnya yang lebih makro (Coté, 1995; Fatimah & Firza, 2021). Guru merupakan suatu profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan, walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang Pendidikan (Alma, 2009; Daele, 1973). Sebagai sebuah profesi, guru memerlukan keterampilan tertentu melalui pendidikan dan latihan yang lama dalam lembaga tertentu dan disiplin ilmu tertentu serta memiliki kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya, serta ada sanksi yang jelas terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi profesinya (Alma, 2008).

Dalam konteks Sejarah Indonesia, Daendels (1808-1811) pernah menginstruksikan kepada para bupati untuk mendirikan sekolah-sekolah dan sekaligus menyiapkan guru-gurunya agar penduduk pribumi mendapatkan pendidikan. Instruksi ini lahir setelah ia menyaksikan banyaknya kerugian yang diderita oleh VOC akibat korupsi yang merajalela (Supriadi, 2002, hlm. 21). Perintah ini tidak pernah terlaksana karena terjadinya peperangan di Eropa, pergantian kekuasaan dari pihak Belanda kepada Inggris (1811) kemudian kembali lagi ke tangan Belanda (1816) (Supardan, 2008; Supriadi, 2002). Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan *Kweekschool* sebagai sekolah untuk menghasilkan guru. "kweekschool" memiliki arti "sekolah pembibitan" atau "sekolah persemaian" atau tempat ditanamkan atau disemaikan bibit-bibit guru (Buchori, 2009, hlm. 12). *Kweekschool* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan guru bumiputera bagi sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu. Lulusan sekolah ini biasanya ditempatkan sebagai guru kelas satu, kepala sekolah kelas satu atau kepala sekolah kelas dua, dan bagi lulusan sekolah ini terbuka

kesempatan untuk meraih akta tingkat menengah, yakni suatu kualifikasi untuk memberikan pengajaran di sekolah tingkat menengah bumiputera (Brugmans, 1938, hlm. 199).

Pendirian sekolah-sekolah guru berjalan lambat akibat "sikap hati-hati" dan sekaligus "sikap setengah hati" Pemerintah Hindia Belanda dalam mengembangkan pendidikan di tanah jajahannya (Raya, 2018). Sikap hati-hati berlaku bagi sekolah-sekolah Eropa, sedangkan sikap setengah hati berlaku untuk sekolah-sekolah yang ditujukan bagi golongan pribumi. Sikap setengah hati dalam pengadaan guru bagi sekolah-sekolah pribumi karena pemerintah Hindia Belanda menganggap hal itu sebagai pemborosan belaka, apalagi yang diajarkan di SR/VR sebatas kemampuan menulis, membaca dan berhitung sederhana (Raya, 2018; Supriadi, 2002). Bagi sekolah-sekolah Eropa, sikap hati-hati kemungkinan demi alasan mutu, karena sekolah-sekolah tersebut harus menyambung dan setara mutunya dengan yang ada di Negeri Belanda.

Meskipun lambat, Belanda lebih mendahulukan pendirian sekolah guru daripada jenis sekolah tingkat menengah lainnya untuk orang Indonesia. Lembaga pendidikan keguruan ini mulai terbentuk sejak permulaan abad ke sembilan belas. Pada awal pembentukan, kalangan zending dan missionaris membuka lembaga pendidikan guru berupa kursus-kursus. Pada tahun 1852 di Surakarta didirikanlah Sekolah Guru Negeri yang pertama. Sebelumnya pemerintah telah menyelenggarakan kursus-kursus guru yang diberi nama *Normaal Cursus* yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru-guru Sekolah Desa (Depdikbud, 1976, hlm. 40). Pada tahun 1852 sampai 1879 telah terdapat 10 lembaga Pendidikan guru yang dibentuk diberbagai wilayah Indonesia.

Di Ambon, *kweekschool* merupakan sekolah swasta yang didirikan pada tahun 1834 oleh misi Gereja yang tergabung dalam NZG yang dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan guru Bumiputera. NZG mendirikan *Kweekschool* di Minahasa pada 1852. Versi lain mencatat bahwa sekolah guru yang pertama kali didirikan oleh Belanda di Indonesia adalah *Hollands-Inlandse Kweekschool* (HIK) milik pemerintah didirikan di Surakarta pada 1852. Pada tahun 1875, sekolah ini dipindahkan ke Magelang. Para siswanya berasal dari keluarga priyai kelas rendah (Supriadi, 2002, hlm. 54). Setelah itu, berturut-turut sekolah serupa didirikan di Bukittinggi (Fort de Kock) tahun 1856, di Tanah Batu Tapanuli (1864-1874), di Tondano (1873-1875), di Ambon (1874), di Probolinggo dan Banjarmasin (1875-1893), di Makassar (1876-1895), dan di Padangsidempuan (1879-1891) (Supriadi, 2002, hlm. 45). Lulusan sekolah-sekolah ini disiapkan untuk mengajar di HIS. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan guru pada sekolah-sekolah Belanda didirikan *Europeese Kweekschool* (EKS) dan untuk sekolah-sekolah Cina membuka juga *Hollands-Chineese Kweekschool* (HCK) (Supriadi, 2002, hlm. 20). Bahasa pengantar di HIK dan HCK adalah bahasa Belanda, yang juga merupakan mata pelajaran wajib (Watson, 1975, hlm. 61).

Ada beberapa perbedaan *Kweekschool* yang dibentuk tahun 1852 dengan yang telah diperbaharui pada 1915. Di *Kweekschool* yang dibentuk tahun 1852, Bahasa Belanda merupakan salah satu bidang studi yang dipelajari dan gurunya pun bangsa Belanda sementara di *Kweekschool* 1915, bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar. Kurikulum pada *Kweekschool* baru lebih ramping, lebih sederhana daripada kurikulum pada *Kweekschool* lama (Buchori, 2009, hlm. 12-13). Saat Bahasa Belanda merupakan Pelajaran wajib, Belanda berupaya menyiapkan guru bahasa Belanda di HIK. Pada tahun 1870-an, Pemerintah Belanda mengirimkan 10 orang Indonesia ke Belanda untuk mempelajari bahasa Belanda. Program ini berhenti pada 1884 tatkala bahasa Belanda bukan lagi merupakan mata pelajaran wajib di HIK (Watson, 1975, hlm. 61). Pada periode akhir masa penjajahan Belanda di Indonesia

(tahun 1940-1942) terdapat beberapa jenis sekolah keguruan, masing-masing mempunyai ciri yang (Supriadi, 2002, hlm. 54).

Pada mulanya, yang dapat diterima sebagai murid pada *Kweekschool* ialah tamatan dari sekolah pemerintah untuk anak-anak pribumi, berumur paling tidak 12 tahun, dan dari keluarga baik-baik. Di kemudian hari, yang dapat diterima di *Kweekschool* ini hanya mereka yang telah tamat Kelas VII HIS. Lama studi di *kweekschool* ini 4 (empat) tahun (Buchori, 2009, hlm. 12). Sampai dengan tahun 1942, untuk orang Indonesia yang ingin menjadi guru terdapat dua jenis sekolah guru, yaitu Sekolah Guru untuk mereka yang akan mengajar di sekolah rendah pribumi dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda, dan sekolah guru untuk mereka yang akan menjadi guru pada sekolah rendah pribumi yang bahasa pengantarnya ialah salah satu dari bahasa-bahasa daerah (Jawa, Sunda, Melayu atau Bugis). Hadirnya *Kweekschool* ternyata kurang diminati oleh golongan kaum bangsawan. Tidak mengherankan jika murid-murid *Kweekschool* kebanyakan dari kalangan masyarakat biasa (pegawai rendah, para pedagang, keluarga mantri atau dari keluarga guru sendiri), walaupun ada dari golongan priyayi, paling dari keluarga priyayi rendahan. Para bangsawan lebih menyukai masuk sekolah *Hoofdschool* yang bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai pemerintah (Poerbakawatja, 1970, hlm. 24).

Lulusan *Kweekschool* mendapat gelar resmi “manteri guru” yang memberikan mereka kedudukan yang nyata di kalangan pegawai pemerintah lainnya. Waktu lama belajar Di *Kweekschool* adalah 6 tahun, kemudian 5 tahun dan akhirnya 4 tahun dengan bahasa pengantar adalah bahasa Belanda, lulusan *Kweekschool* ini memiliki wewenang untuk mengajar hingga kelas tertinggi seperti sekolah menengah (Dewi, 2019).

*Kweekschool* (KS) menerima lulusan HIS dan lama belajarnya adalah empat tahun

dengan bahasa pengantar bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Mata pelajarannya adalah Bahasa Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Daerah, Berhitung, Al-jabar, Ilmu Ukur, IPA, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah Tanah Air, Sejarah Dunia, Ilmu Mendidik, Ilmu Jiwa, Ilmu Mengajar, Ilmu Komunikasi, Gerak Badar/Olahraga, Atletik, Bernyanyi, Menulis, Membaca, Pekerjaan Tangan, Musik, dan Praktek Mengajar di sekolah dasar dan sekolah berbahasa Belanda. Semua siswa diasramakan untuk belajar bersosialisasi, sopan santun, tatakrma, dan moral/budi pekerti. Lulusannya diangkat menjadi guru atau kepala sekolah di HIS, Sekolah Angka 2, atau di Schakelschool dengan gaji 75-125 *gulden* per bulan (Supriadi, 2002, hlm. 56).

Artikel ini akan menguraikan secara singkat berbagai jenis pendidikan guru pada masa kolonial dari aspek sejarahnya, kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana serta berbagai aspek lainnya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pola Pendidikan guru masa Kolonial Belanda yang disesuaikan dengan sistem Pendidikan kolonial. Riset tentang Sekolah Pendidikan Guru masa Belanda terbagi menjadi tiga fokus kajian, yaitu kajian sejarah Pendidikan secara umum (Sedyawati, Zainuddin, Wuryantoro, 1991; Makmur, Haryono, & Musa, 1993; Sjamsuddin, Sastradinata, & Hasan, 1993; Syaharuddin & Susanto, 2019), kajian sejarah Pendidikan guru masa kolonial (Buchori, 2007; Golterman, 1965; Purwanti, 2018; Verhoeven, 1957), dan kajian salah satu Lembaga Pendidikan guru masa Kolonial. Kajian yang fokus pada Lembaga-lembaga Pendidikan guru masa kolonial misalnya dilakukan oleh Praresta Sasmaya Dewi (2019) yang mengkaji Perkembangan *Kweekschool* (Sekolah Guru) Di Yogyakarta Tahun 1900-1927, Seviana (2019) yang mengkaji Lembaga Pendidikan calon guru (*Hoogere Kweekschool*) di magelang (1918-1932). Ada juga penelitian yang memfokuskan kajian pada kiprah alumni *Kweekschool* (Alfarez, 2022).

## METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode sejarah. Metode Sejarah terdiri dari empat tahap pokok yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi (Sjamsuddin, 2007). Pada proses heuristik (Pengumpulan Sumber), peneliti melakukan pencarian sumber dan bukti-bukti sejarah dan bagaimana menghubungkannya. Sumber yang dipakai dalam proses penelian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Sumber primer lain yang digunakan berupa *Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indië Loopende over de Jaren 1893 t/m 4*. Arsip cukup lengkap tersedia di ANRI dan KITLV. Sumber sekunder diambil melalui jurnal dan internet serta buku-buku mengenai Sejarah Pendidikan di Indonesia. Berbagai literatur tersebut telah menguraikan Pendidikan guru masa kolonial namun dengan uraian yang tidak mendalam. Proses verifikasi (Kritik Sumber) merupakan verifikasi atas sumber data yang telah dikumpulkan baik berupa sumber yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Proses ini dilakukan dengan pengujian data penelitian secara objektif tanpa adanya unsur emosional-subjektif sehingga data yang diperoleh faktual, terpecaya, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Proses verifikasi dilakukan dengan membaca semua sumber yang dikumpulkan kemudian dilakukan kritik terkait sumbernya dari segi keilmuan penulis, isi narasi artikel, hingga tujuan/motivasi penulisan artikel.

Proses interpretasi (penafsiran) dilakukan dengan peran peneliti dalam melakukan tafsiran atas sumber yang telah diverifikasi. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis data kemudian dihubungkan fakta-fakta yang ada dalam setiap sumber penelitian. Selain itu, peneliti perlu melakukan tahap tafsiran terhadap kritik dengan melakukan kombinasi teori dengan fakta yang ditemukan. Penafsiran tersebut dilandasi dengan objektivitas, tidak

ada unsur kepentingan politis, maupun memperburuk citra sesuatu yang diangkat dalam judul penelitian. Tujuan penafsiran tersebut dilakukan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang mendekati faktual dan kebenaran sesuai dengan fakta. Proses interpretasi dilandasi dengan hakikat keilmuan, hasil analisis, dan kemampuan imajinatif dari peneliti dalam menyusun proyek selanjutnya untuk melakukan historiografi (penulisan sejarah). Historiografi (Penulisan Sejarah) Tahap akhir dalam penelitian ini dilakukan dengan pembuatan historiografi (penulisan sejarah). Historiografi dimaknasi sebagai proses penulisan sejarah berdasarkan asas ilmiah yang dipertanggungjawabkan dengan penelitian dan fakta sejarah. Proses pembuatan karya sejarah dilakukan dengan sistematis untuk menyajikan interpretasi hasil rekonstruksi peristiwa sejarah. Sehingga tersusun sebuah sejarah sebagai peristiwa, peristiwa yang direkonstruksi merupakan penjabaran dari fakta, sumber, dan analisis data (verifikasi), hingga interpretasi dari peneliti khususnya terkait pendidikan era kolonial Belanda terutama sebagai bentuk historiografi yang bertema kolonial bidang pendidikan.

## PEMBAHASAN

### 1. Berbagai Jenis Pendidikan Guru di Hindia Belanda

Pendidikan guru menjadi masalah penting dalam masa perluasan pendidikan. Sekolah guru (*Kweekschool*) pertama dibuka pada tahun 1852 di Solo, segera diikuti oleh Sekolah Guru lainnya di berbagai kota di Indonesia. Namun, setelah terjadi depresi ekonomi jumlahnya dikurangi (Buchori, 2009; Nasution, 1983). Sebelum Sekolah Guru dapat menghasilkan jumlah guru yang cukup, tidak diadakan syarat khusus untuk melakukan profesi guru ini. Akibatnya, mutu pendidikan sering sangat rendah apa lagi di luar Jawa. Di antara guru-guru ada yang tidak pandai berbahasa Melayu, yang tak lancar membaca, atau tak

dapat mengalikan (Nasution, 1983, hlm. 40). Kebutuhan guru yang mendesak setelah 1863 mendorong pemerintah memutuskan pada tahun 1892 akan mengangkat guru tanpa pendidikan guru. Pada tahun 1875 diadakan ujian bagi mereka yang ingin mendapat kualifikasi guru tanpa melalui Sekolah Guru. Gaji guru yang berwenang penuh berjumlah f 30,- - f 50,- sebulan, yang kemudian dinaikkan pada tahun 1878 menjadi minimum f 75,- dan maksimum f 150,- per bulan.

Lulusan sekolah guru (*Kweekschool*) mendapat gelar resmi “manteri guru” yang memberikan mereka kedudukan yang nyata di kalangan pegawai pemerintah lainnya serta mereka berhak untuk menggunakan payung menurut ketentuan pemerintah, tombak, tikar, dan kotak sirih. Mereka juga mendapat biaya untuk menggaji empat pembantu yang membawa keempat lambing kehormatan itu. Tanda-tanda kehormatan itu membangkitkan rasa hormat orang, termasuk murid-muridnya sendiri, khususnya anak-anak kaum ningrat (Buchori, 2009; Nasution, 1983). Pada perkembangan berikutnya, kualitas sekolah guru meningkat dan memperoleh kedudukan seperti sekolah menengah.

Pada tahun 1871, kurikulum *Kweekschool* meliputi: Bahasa daerah (dengan buku karangan orang Belanda), berhitung (menggunakan buku Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu atau daerah), geometri elementer, geografi (meliputi Indonesia, Belanda, dan dunia), sejarah, ilmu alam (botani, zoologi, dan fisika), menggambar, pedagogi (teori dan praktek), menulis tangan (huruf latin, Jawa, dan lain-lain tergantung daerahnya), dan bernyanyi. Bahasa Belanda efektif sejak 1871 akan tetapi dihapuskan tahun 1886 karena mengganggu studi Pelajaran lainnya. Guru Belanda yang tidak cukup menguasai Bahasa Melayu, cenderung mengajarkan segala sesuatu dalam Bahasa Belanda yang tidak dipahami siswa pribumi (Nasution, 1983, hlm. 41-42).

Perbandingan antar kurikulum *Kweekschool* sebelum dan sesudah 1892 tidak menunjukkan

perbedaan yang menyolok. Bahasa Belanda dan pendidikan jasmani telah dihapuskan pada tahun 1884, akan tetapi mengukur tanah kembali dimasukkan karena perlu bagi lulusan sekolah kelas satu, kebanyakan anak priyayi untuk pekerjaan mereka di pemerintahan dan Perusahaan swasta.

Kebutuhan sekolah rendah mulai mempengaruhi sekolah guru. Sampai 1892 kurikulum sekolah dasar ditentukan oleh sekolah guru. Semua mata pelajaran sekolah guru, kecuali ilmu mendidik boleh diajarkan di sekolah rendah. Kebutuhan akan Bahasa Belanda di sekolah kelas satu menyebabkan pemerintah memasukkan kembali Bahasa Belanda ke dalam program sekolah guru pada 1907 di semua *Kweekschool*. Untuk itu lama belajar diperpanjang dari empat menjadi enam tahun. Dua tahun pertama digunakan untuk belajar Bahasa Belanda agar menjadi Bahasa pengantar untuk tahun-tahun selanjutnya (Buchori, 2009; Nasution, 1983).

Berdasarkan peraturan tahun 1876, lulusan sekolah guru ini biasanya dijadikan kepala sekolah kelas satu maupun sekolah kelas dua. Sesudah 1900, tidak memungkinkan penempatan lulusan *Kweekschool* sebagai kepala sekolah karena jumlah lulusannya tidak mencukupi sehingga pemerintah terpaksa mengangkat kepala sekolah dengan kualifikasi yang lebih rendah (Buchori, 2009; Nasution, 1983). Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kolonial membuka kursus-kursus khusus untuk mendidik guru-guru untuk sekolah kelas dua. Pada tahun 1909 dibuka kursus 2 tahun pada sore hari sebagai percobaan, akan tetapi ternyata tidak memuaskan. Para pelajar bekerja pagi hari sebagai guru bantu dan harus mempersiapkan pelajaran pada malam harinya sehingga tidak cukup waktu untuk belajar (Nasution, 1983).

Kelembagaan pendidikan guru di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan perkembangan. Pada abad ke duapuluh sejalan dengan perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan maka pendidikan guru

juga mengalami perubahan dan akhirnya terdapat beberapa macam yaitu (Buchori, 2009; Nasution, 1983; Depdikbud, 1976; Supriadi, (ed), 2003):

- a. Jenis pertama adalah sekolah yang diperuntukkan bagi golongan pribumi, yaitu CVO (*Cursus Opleiding voor Volks Onderwijzer*) dan *Normalschool*, dengan masa pendidikan masing-masing dua dan empat tahun setelah sekolah rendah lima tahun. Lulusan-lulusannya menjadi guru sekolah desa tiga tahun dan sekolah dasar nomor 2 yang lama masa belajarnya lima tahun. *Normaalschool* merupakan Sekolah guru dengan masa pendidikan empat tahun dan menerima lulusan sekolah dasar lima tahun, berbahasa pengantar bahasa daerah.
- b. *Kweekschool*, Sekolah guru empat tahun yang menerima lulusan sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda.
- c. *Hollandsch Inlandsche Kweekschool* merupakan sekolah guru enam tahun berbahasa pengantar Belanda dan bertujuan menghasilkan guru-guru HIS/HCS. HIK merupakan pendidikan guru yang berorientasi Belanda (HIS) dengan lama pendidikan enam tahun setelah sekolah dasar 7 tahun. HIK merupakan sekolah keguruan yang didirikan oleh Belanda ini berada dalam lingkup kabupaten, biasanya terdapat di desa-desa. Sebutan pendidik dari HIK (*Holandsche Indische Kweekschool*) adalah guru bantu. Sekolah ini banyak diakses oleh para pribumi yang memiliki gaji rendah. Bahasa pengantar yang digunakan di HIK adalah melayu dan beberapa bahasa daerah di kabupaten setempat.
- d. HKS (*Hoogere Kweekschool*) merupakan sekolah guru yang didirikan untuk menunjang kebutuhan guru-guru yang berada di daerah perkotaan seperti Batavia, Soerabaija, Yogyakarta, Semarang.
- e. EKS (*Europeesche Kweekschool*) merupakan sekolah dengan tingkatan untuk golongan-golongan tertentu saja. Sehingga beberapa

kelas sosial rendah sulit untuk masuk ke EKS karena keterbatasan biaya pendidikan. Beberapa akses pendidikan EKS hanya untuk golongan orang Belanda, orang Arab/Tionghoa maupun orang pribumi yang mahir sekali berbahasa Belanda. Sekolah ini hanya berada di Surabaya. Bahasa pengantar yang dijadikan bahasa wajib di EKS adalah bahasa Belanda.

- f. HCK (*Hollandsche Chineesche Kweekschool*) merupakan sekolah khusus keguruan yang diperuntukkan hanya untuk pendatang asing dari China. Biasanya lulusan dari HCK akan mengajar di sekolah rendah khusus China seperti HCS. Bahasa pengantar yang digunakan di sekolah ini adalah bahasa Mandarin.

Disamping sekolah tersebut di atas masih terdapat kursus-kursus yang diselenggarakan oleh swasta terutama lembaga keagamaan. Lama kursus bervariasi antara dua sampai empat tahun, dengan macam-macam penamaan dan istilah (Depdikbud, 1976, hlm. 40; Setiawan, 2014). Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta Sekolah ini merupakan sekolah guru yang berbasis keagamaan terutama landasannya Islam. Didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan tahun 1918 M. Sekolah ini terinspirasi dari kunjungan KH. Ahmad Dahlan ketika mengunjungi Kolese Xaverius Muntilan yang juga merupakan sekolah guru berbasis Kristen. Bahasa yang digunakan di sekolah ini umumnya bahasa Melayu dan juga bahasa Jawa (Setiawan, 2014).

## 2. Siswa di Pendidikan Calon Guru

Sekolah guru (*Kweekschool*) di Surakarta didirikan pada 1852 atas intruksi dari raja karena kebutuhan guru yang terbatas, sehingga banyak golongan priyayi Jawa menjadi muridnya. Pada awalnya sulit mencari siswa untuk *Kweekschool* (sekolah guru) dan anak-anak priyayi sering menggunakan profesi dan guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan di kantor pemerintahan yang lebih terhormat dalam pandangan mereka. Tidak ada persyaratan untuk menjadi calon sekolah guru

dan tidak ada sekolah yang mempersiapkan siswa untuk itu. Syarat satu-satunya ialah usia (minimum 14 dan maksimum 17) dan ini pun tak dapat dipastikan karena tidak adanya surat kelahiran. Ada kalanya calon tanpa berpengetahuan Bahasa Melayu, berhitung dan membaca harus diterima. Karena itu sekolah guru pada taraf permulaannya tak ubahnya sekolah rendah (Buchori, 2009; Nasution, 1983).

Untuk menarik lebih banyak murid pemerintah menetapkan kenaikan gaji guru yang cukup besar dan mengizinkan lambang-lambang kehormatan sosial tertentu. Pada saat yang sama dikeluarkan peraturan yang menentukan bahwa guru lulusan *kweekschool* dapat ditempatkan dalam tiap jabatan pemerintah tanpa izin gubernur-jenderal. Jumlah pelamar segera meningkat sehingga setelah 1892 harus diadakan ujian seleksi dan mereka yang lulus pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu. Hanya 10-15% terbaik akhirnya dapat diterima di *kweekschool* (Nasution, 1983).

Ada berbagai alasan mengapa *kweekschool* banyak menarik peminat. *Pertama*, pendidikan guru itu bebas dari pembayaran uang sekolah, bahkan setiap siswa menerima uang saku tiap bulan sehingga orang tua bebas pula dari pengeluaran lainnya. Ongkos perjalanan ditanggung pemerintah. *Kedua*, para lulusan sudah dapat dipastikan akan mendapat pekerjaan pada sekolah pemerintah dengan gaji yang baik yang memberikan status terhormat dalam Masyarakat sebagai pegawai pemerintah dan orang "intelektual". *Ketiga*, dalam jangka waktu yang lama, *Kweekschool* merupakan salah satu jalan yang sangat langka bagi golongan menengah dan rendah di kalangan orang Indonesia untuk menikmati pendidikan lanjutan. Akhirnya guru adalah orang yang sangat dihormati dalam Masyarakat Indonesia (Buchori, 2009; Nasution, 1983).

Sebelum 1892, siswa-siswa *Kweekschool* tinggal dalam asrama dan dengan demikian dapat diawasi secara ketat. Di Yogya misalnya siswa dianjurkan memakai pakaian batik menurut pola

yang digunakan oleh golongan ningrat (Nasution, 1983). Bahasa pengantar ialah Bahasa daerah, jadi di Bandung Bahasa Sunda, di Yogya Bahasa Jawa, dan di Bukittinggi Bahasa Melayu. Akan tetapi sejak dimasukkannya Pelajaran Bahasa Belanda dengan dipekerjakannya empat-lima orang guru Belanda, maka Bahasa Belandalah yang menjadi Bahasa satu- satunya di semua (Nasution, 1983). Tahun ke-6 dikhususkan untuk praktek mengajar pada sekolah “ekstern” yang disudahi dengan ujian akhir. *Kweekschool* biasanya sebagai besar (lebih dari 95%) dari siswa lulus dalam ujian itu. Mereka yang tidak lulus pun masih dapat diangkat sebagai guru dengan gaji yang lebih rendah, yakni f 20,- sedangkan yang lulus mendapat f 40,- sebulan (Buchori, 2009; Nasution, 1983).

### **3. Kompetensi Guru untuk berbagai tingkatan Sekolah**

Berbagai usaha dijalankan untuk memperoleh guru yang berkualifikasi tinggi: mendatangkan dari negeri Belanda, melatihnya di Indonesia atau menyuruh pemuda ke Belanda untuk pendidikan guru (Nasution, 1983). Karena tak mudah mendatangkan guru dari negeri Belanda maka diberi sejumlah kemudahan seperti yang sebanyak f 500 – f 700 untuk membeli keperluan-keperluan setiba di Indonesia, tambahan f 75,- untuk tiap akta, 10% dari uang sekolah untuk kepala sekolah, bebas perumahan atau uang sebanyak f 60 – f 100 sebulan. Selain itu cuti 8 bulan tiap 6 tahun atas biaya pemerintah. Walaupun demikian tetap saja masih kekurangan guru. Karena itu tiap tahun dikirim 24 calon ke Belanda yang belajar selama 2 tahun pada sekolah guru atas biaya pemerintah (Buchori, 2009; Nasution, 1983). Walaupun guru-guru telah dididik di Indonesia, guru baru masih terus didatangkan dari negeri Belanda, pertama karena masih kekurangan guru, akan tetapi juga untuk mendapatkan guru-guru yang segar dari Belanda sehingga dapat memelihara suasana Belanda yang murni (Nasution, 1983). Jumlah guru pada tahun 1890 sebanyak 453 orang pada 144 sekolah, atau 3,2 guru per sekolah,

dengan 12.377 murid. Pada tahun 1910 jumlah guru 1.056 pada 194 sekolah dengan 24.182 murid atau 5,4 guru per sekolah (Buchori, 2009; Nasution, 1983).

HIS merupakan lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat, khususnya mempelajari bahasa Belanda sebagai kunci untuk pendidikan lanjutan, pintu kebudayaan Barat, dan syarat untuk memperoleh pekerjaan. Bahasa Belanda memberikan pretise dan memasukkan seseorang ke dalam golongan intelektual dan elite (Nasution, 1983). Sukarnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang senantiasa bertambah maka digunakan guru-guru Indonesia lulusan HKS (*Hogere Kweekschool*). HKS (*Hogere Kweekschool*) pertama kali dibuka di Purworejo pada tahun 1914. Hanya mereka yang terbaik lulus dalam ujian *Kweekschool* yang diterima di HKS. Hanya 9 dari 23 lulusan *Kweekschool* Bandung pada tahun 1916 diterima di HKS. Dapat dibayangkan tingginya penghargaan Masyarakat terhadap lulusan HKS, lembaga pendidikan guru tertinggi pada saat itu (Nasution, 1983). HKS bukan sekolah untuk golongan elite sosial akan tetapi bagi elite intelektual (Nasution, 1983).

Guru MULO (*Meer Uitgebreid Lager Ounderwijs*) disiapkan untuk sekolah rendah. Namun, Pelajaran MULO jauh melebihi apa yang diajarkan di sekolah rendah sehingga memerlukan guru-guru yang berkompentensi tinggi. Mereka harus memiliki ijazah HA (*Hoofdacte*), akta kepala sekolah. Di samping itu ijazah khusus untuk mata Pelajaran tertentu. Pemerintah menggalakkan kursus-kursus dan menyediakan macam-macam ujian untuk memperoleh diploma. Kursus itu ditempuh selama dua tahun sebanyak enam jam Pelajaran seminggu (Nasution, 1983). Guru MULO mendapat tambahan gaji sehingga kedudukannya terhormat. Seluruh staf terdiri atas orang Belanda kecuali guru Bahasa Melayu atau daerah. Bagi guru Indonesia akan sulit untuk mencapai gelar HA, kecuali bila ia belajar di Belanda sehingga mengajar



di MULO merupakan monopoli guru-guru Belanda (Nasution, 1983).

Hanya mereka yang memiliki ijazah Ph.D (Doktor) atau diploma M.O. berwenang mengajar di HBS. Diploma MO-B adalah ijazah tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang guru, yang dapat disamakan dengan gelar doktor. Namun karena sulitnya memperoleh guru dengan kualifikasi yang demikian, maka dipekerjakan guru dengan ijazah yang lebih rendah. Maka mereka yang berijazah Ir, perwira AD dan AL, pemegang diploma MO.- A (wewenang mengajar pada tiga tahun pertama HBS) bahkan yang berijazah HA (*Hoofdacte*) untuk sementara dapat dipekerjakan pada HBS, khususnya di kelas-kelas rendah.

Di Hindia Belanda dibuka kursus normal dua tahun untuk mendidik guru ELS dan kursus normal tiga tahun untuk mendapat tingkat kepala sekolah. Kursus ini diadakan tiap petang antara jam 16.30 – 20.00. Kurikulumnya terutama merupakan pendalaman dan perluasan mata pelajaran yang diberikan di ELS (Nasution, 1983). Pada awalnya, tiap ELS hanya mempunyai tiga kelas, yakni kelas rendah, menengah, dan atas. Bila jumlah murid kurang dari 30 orang, hanya seorang kepala sekolah menanganinya, untuk 30 – 69 murid seorang kepala sekolah dan seorang guru, untuk 70 – 119 murid seorang kepala sekolah dan 2 orang guru. Sejak 1907 ELS terbagi atas 7 kelas, akan tetapi di kota kecil beberapa kelas harus disatukan.

Pernah timbul masalah Ketika dua wanita Indonesia berhasil mendapat ijazah guru di negeri Belanda, yang secara legal berwenang untuk mengajar ELS, karena tidak ada undang-undang yang mengadakan diskriminasi kebangsaan atau rasial (Nasution, 1983). Dewan Hindia menyampaikan dengan tegas bahwa pribumi tak layak mendidik anak Belanda. Sejak itu, sampai Belanda menyerah kepada Jepang, tak seorang Indonesia pun yang pernah diangkat sebagai guru ELS. Untuk mencegah terulangnya kejadian ini di

kemudian hari, dianjurkan agar dalam ujian masuk sekolah guru di Belanda harus dipersulit ujian mengenai Bahasa Belanda (Nasution, 1983, hlm. 97).

Berkaitan dengan gaji guru, tamatan *Hogere Kweekschool* (HKS) atau *Hollands Inlands Kweekschool* (HIK) adalah sebesar f. 70,- sampai f. 250,- per bulan, *Europese Kweekschool* f. 125,- per bulan, dan tamatan *Hoofdacte* sebesar f. 130,- per bulan. Gaji guru-guru bumiputera jauh di bawah gaji guru-guru Eropa. Seorang guru kebangsaan Eropa dapat menerima gaji di atas f. 100,- per bulan, sementara gaji yang diterima seorang guru bumiputera lulusan *Kweekschool* adalah f. 75,- per bulan. Adanya perbedaan gaji dari masing-masing lulusan sekolah yang ada pada waktu itu, membuat guru-guru bumiputera berusaha untuk memperjuangkan nasibnya. Dwidjosewojo sebagai anggota Pengurus Besar Budi Utomo mulai memikirkan wadah perjuangan para guru dengan membentuk Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada akhir tahun 1911. PGHB yang anggotanya terdiri dari Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah mendapatkan badan hukum dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 18 Desember 1912 (Sutamto, 1992, hlm. 22).

Dari segi penghasilan (gaji), *Departement van Onderwijs en Eredienst* (Departemen Pendidikan dan Agama) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menangani gaji guru-guru bumiputera, membuat ketentuan bahwa penghasilan guru-guru berdasarkan atas ijazahnya. Untuk lulusan Guru Sekolah Desa, gaji permulaan sebesar f. 7,50 per bulan. Pemerintah Hindia Belanda sendiri menetapkan penghasilan mereka minimal f. 15,- maksimal f. 20-25,- per bulan, hal itu disebabkan mereka bukanlah pegawai pemerintah. Untuk menutupi kekurangan gaji tersebut dapat diambil dari kas desa, tetapi jika kas tidak mampu membayar dengan uang, dapat diganti dengan tanah bengkok guru desa, yaitu berupa tanah sawah atau tanah

garapan dengan luas tertentu. Bagi guru-guru bantu Sekolah Kelas Dua yang merupakan lulusan Kursus Guru Bantu selama dua tahun, mendapat gaji sekitar f. 20,- sampai f.30,- per bulan. *Normaalschool* yang melahirkan guru sekolah kelas dua mendapat gaji sekitar f. 30,- sampai f. 45,- per bulan (Dwijdja Oetomo. "Keloeh Kesah Bangsa Goeroe-goeroe", 25 April 1914). Sementara itu guru-guru lulusan *Kweekschool* yang biasanya ditempatkan sebagai Kepala Sekolah Kelas Dua, Kepala Sekolah Kelas Satu atau guru Sekolah Kelas Satu, menerima gaji sekitar f. 75,- sampai f. 150,- per bulan. Dibandingkan dengan guru-guru Sekolah Desa, Guru Bantu Kelas Dua dan *Normaalschool*, lulusan *Kweekschool* lebih dihargai oleh pemerintah. Hal itu wajar karena kecakapan dan pendidikannya lebih tinggi ditambah dengan kemampuan dalam bahasa Belanda.

Perbedaan gaji tidak hanya antara guru-guru bumiputera dan guru-guru berkebangsaan Eropa, tetapi juga di antara guru-guru bumiputera terdapat perbedaan. Sejak tahun 1878, lulusan *Kweekschool* menerima gaji di atas f. 75,- sampai 150,- per bulan. Guru-guru bantu Sekolah Kelas Dua mendapat gaji sekitar f. 20,- sampai f. 30,- per bulan. Jika disesuaikan dengan kenaikan harga-harga barang kebutuhan hidup, gaji tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup (*Dwidja Oetomo*, 10 Desember 1914). Keadaan itu dijadikan dasar untuk menuntut kenaikan gaji. Pada tahun 1914 pemerintah menaikkan gaji guru-guru bantu dan gaji guru Sekolah Kelas Dua sebesar f. 5,-, tetapi kenaikan tersebut belum cukup memuaskan mereka (*Darmo Kondo*, 10 Oktober 1914).

#### 4. **Hollandsch Inlandsche Kweekschool (HIK)**

HIK dibuka dengan maksud sebagai persiapan untuk mendirikan sekolah-sekolah bumiputra. Pembukaan sekolah pendidikan guru ini pertama kali diusahakan oleh pihak swasta (*Zending*) di Ambon pada tahun 1834,

sedangkan di Pulau Jawa, HIK pertama kali didirikan oleh pemerintah di Surakarta pada tahun 1852 (Lubis dkk, 2003, hlm. 16). HIK berlanjut dibuka di berbagai daerah dan tersebar di seluruh Indonesia seperti yang terdapat di daerah Bukittinggi (1856), Tapanuli (1864), Tondano (1873), Ambon (1874), Probolinggo (1875), Banjarmasin (1875), Makassar (1876) dan Padang Sidempuan (1879). Sekolah yang berjenis seperti ini mengalami pasang surut dalam masa perkembangannya (Alfarez, 2022; Dewi, 2019). Bangunan sekolah pada *Kweekschool* Yogyakarta dibangun pada 1894 dan dibuka pada 7 April 1897. Sekolah ini pada awalnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. didirikannya yaitu untuk memenuhi tenaga didik Hindia Belanda. Lama studi di sekolah ini adalah empat tahun. Bahasa pengantar yang digunakan dalam sekolah guru di Surakarta adalah Melayu dan Jawa hingga pada akhirnya dipindahkan sekolah guru (*Kweekschool*) tahun 1875 ke Magelang (Alfarez, 2022, hlm. 35). Pada awalnya, Bahasa pengantar pada HIK adalah Bahasa Melayu, tetapi setelah Bahasa Belanda pada tahun 1865 diajarkan maka sejak tahun 1871 bahasa Belanda dijadikan Bahasa pengantar.

Setelah HIK Surakarta berjalan sampai dengan tahun 1866, jumlah muridnya meningkat dengan pesat sehingga tidak dapat ditampung lagi. Mengingat hal itu, maka pada pertengahan tahun 1866 di Bandung dibuka sebuah HIK. Murid pertamanya berjumlah 27 orang, di antaranya operan dari HIK Surakarta. Sejak itu Kota Bandung menjadi pusat pendidikan pribumi. Di daerah Priangan, HIK biasa disebut juga Sekola Raja. Dengan adanya HIK di Bandung, pendidikan pribumi di Tatar Sunda dapat berkembang karena adanya tenaga guru untuk mengajar, baik di sekolah pemerintah maupun di sekolah swasta misalnya di HIS, termasuk HIS Pasundan (Lubis dkk, 2003, hlm. 16). Pada tahun HIK diresmikan, sekolah rendah di seluruh Priangan berjumlah dua puluh dua buah. Apabila dibandingkan

dengan jumlah penduduk Priangan (pribumi) waktu itu, yakni lebih dari 800.000 orang, jumlah sekolah rendah masih sedikit. Hal itu terutama disebabkan pemerintah belum menyediakan anggaran Pendidikan (Lubis dkk, 2003).

Sejak tahun 1867, HIK Bandung dan sekolah-sekolah pribumi di Priangan mendapat subsidi dari Pemerintah Keresidenan Priangan. Setiap murid HIK mendapat tunjangan f 10 perbulan. Guru dan pegawai sekolah itu mendapat gaji bulanan sesuai dengan jabatan/ kedudukan dan tugas masing-masing. Gaji pada tahap awal adalah sebagai berikut: kepala sekolah f 400,-; guru kelas dua f 300,-; guru pribumi f 30,-; tenaga administrasi f 8,-; dan pesuruh f 5,-. Dengan adanya subsidi, HIK dapat memberikan uang sewa tempat kepala sekolah pribumi milik bupati yang berdiri di sebelah utara HIK. Sekolah pribumi itu dijadikan praktik mengajar oleh murid HIK (Lubis dkk, 2003).

Tabel 1 Kurikulum HIK Bandung Tahun 1866/1867

No.	Mata Pelajaran	Kelas & Jam Pelajaran		
		I	II	III
1.	Bahasa Sunda (membaca)	2	2	2
2.	Bahasa Melayu (membaca huruf latin)	2	2	4
	Bahasa Melayu (membaca huruf Arab)	2	2	4
3.	Menulis huruf latin	2	2	2
4.	Menulis huruf Sunda	2	2	4
5.	Menulis huruf Arab-Melayu	1	1	2
6.	Bahasa Belanda	4	4	3
7.	Berhitung	2	4	4
8.	Aljabar	2	-	-
9.	Sejarah	1	1	1
10.	Ilmu bumi	2	2	2
11.	Ilmu alam	2	2	-
12.	Ilmu ukur tanah	4	4	-
13.	Pedagogik	-	-	3

14.	Menggambar	3	3	3
15.	Seni suara	2	2	-
16.	Tembang Sunda	1	1	-
Jumlah jam Pelajaran		34	34	34

HIK menerapkan peraturan secara tegas dan disiplin tinggi kepada murid. Oleh karena itu, pada tahap awal jumlah murid tidak banyak. Pada tahun 1866 -1867, murid HIK berjumlah tiga puluh orang dan berasal dari daerah Priangan. Akan tetapi, tahun-tahun selanjutnya murid HIK berasal dari beberapa daerah di luar Priangan, bahkan dari luar Tatar Sunda. Pada akhir tahun 1867 jumlah murid berubah menjadi dua puluh lima orang. Hal itu terjadi karena lima orang murid (dua orang dari Priangan dan tiga orang masing-masing dari Krawang, Jakarta, dan Banten) terpaksa diberhentikan karena prestasinya jelek dan tidak memiliki bakat untuk menjadi guru. Kedua puluh lima orang murid itu, sepuluh orang berasal dari Priangan (termasuk Bandung), tujuh orang dari Jakarta dan Bogor, enam orang dari Cirebon, dan satu orang masing-masing dari Karawang dan Banyumas. Mereka terbagi atas: 10 orang kelas I, 3 orang kelas II, dan 12 orang kelas III. Usia mereka antara antara 15 tahun sampai dengan 24 tahun. Bulan Oktober 1867, dua orang murid kelas III diangkat sebagai “guru bantu” di Sekolah Dasar Kelas Satu atau “Sekolah Kabupaten” di Kota Bandung. Sekolah tersebut kekurangan guru, sedangkan jumlah murid mencapai 101 orang. Kedua “guru bantu” masing-masing mendapat honotarium 50 sen per bulan (Lubis dkk, 2003, hlm. 18-19).

Agar murid HIK mahir berbahasa Belanda, mulai tahun 1871 bahasa Belanda dijadikan Bahasa pengantar utama. Pada tahun itu murid baru HIK hanya delapan orang, seorang di antaranya berasal dari Sumatra Utara. Pada tahun itu HIK sudah menghasilkan guru pribumi cukup banyak. Mereka pada umumnya menjadi guru di sekolah-sekolah pribumi. Sejak tahun itu sekolah dasar negeri

untuk pribumi berdiri hampir di setiap ibu kota distrik di Priangan/ Tatar Sunda. Sekolah distrik di Priangan terutama terdapat di Bandung 16 sekolah, Cianjur 6 sekolah, Sumedang 10 sekolah, dan Sukapura 15 sekolah. Selain di Tatar Sunda, ada pula lulusan HIK yang menjadi guru di daerah Jawa Tengah. Di antara mereka ada yang menjadi “mantri guru” (*hoofdonderwijzer*) ada sekolah kelas dua. Hal tersebut kelas menunjukkan, bahwa pendidikan merupakan saluran mobilitas vertical (Lubis dkk, 2003, hlm. 20).

Untuk menarik minat anak-anak pribumi menjadi guru, pemerintah mengatur kenaikan gaji guru. Gaji pertama lulusan HIK adalah f 25 per bulan, dengan kenaikan setiap empat tahun. Gaji yang cukup besar bagi ukuran Masyarakat golongan rendah, mendorong minat sejumlah lulusan sekolah pribumi untuk melanjutkan pendidikan ke HIK, baik atas dorongan orang tua maupun atas kaingin anak yang bersangkutan. Selain itu, ada faktor lain yang menarik minat untuk menjadi murid HIK. Pertama, pendidikan bersifat gratis, murid tidak perlu membayar uang sekolah. Setiap murid justru mendapat tunjangan. Kedua, jaminan mendapat pekerjaan. Selain menjadi guru, lulusan HIK dapat menjadi pegawai pemerintah tanpa harus mendapat izin dari gubernur jenderal. Hal itu mengandung arti bahwa pendidikan di HIK merupakan saluran perubahan dalam kehidupan sosial Masyarakat pribumi, khususnya bagi guru lulusan sekolah itu (Lubis dkk, 2003, hlm. 20-21).

Keberadaan sejumlah guru lulusan HIK dan minat untuk sekolah di kalangan anak-anak meningkat, mendorong pemerintah untuk menambah jumlah sekolah pribumi. Akhir tahun 1876 di Priangan terdapat 51 sekolah pribumi, dengan jumlah murid 2.256 orang. Sekolah itu terdiri atas 15 sekolah dasar negeri dengan 1.212 murid, 34 sekolah dasar swasta bersubsidi dengan jumlah murid 969 orang, dan 2 sekolah dasar swasta tanpa subsidi dengan jumlah murid 75 orang. Pada tahun 1882 HIK menghasilkan 47 orang guru dan memiliki “guru bantu” (*hulponderwijzer*) 22

orang. Tahun 1883-1884, HIK memiliki murid 100, 99, 100 orang tiap tahun ajaran (Lubis dkk, 2003, hlm. 21-22).

Hasil pendidikan HIK dan *Hoofdenschool* memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal sehingga status sosial lulusan kedua sekolah tersebut meningkat. Pada sisi lain, kedua sekolah tersebut khususnya dan pendidikan pribumi pada umumnya, menyebabkan perubahan dalam kehidupan sosial budaya. Melalui pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial, murid-murid disadari atau tidak menyerap unsur budaya barat. Setelah mereka lulus dan mendapat pekerjaan, status sosial mereka meningkat menjadi golongan menak kelas menengah. Pada gilirannya hal itu berpengaruh terhadap kehidupan mereka di lingkungan Masyarakat (Lubis dkk, 2003, hlm. 26).

### **5. *Hogere Kweekschool***

*Hogere Kweekschool* (HKS) pada tahun 1927 dimodernisasikan, dan diganti dengan program pendidikan guru yang baru, dan nama sekolah diubah menjadi *Hollandsch Inlandsche Kweekschool*, lazim disebut dengan singkatannya, HIK. Perubahan ini dilakukan secara berangsur-angsur. Murid-murid HKS yang pada tahun 1927 duduk di kelas terendah (Kelas 1) dibagi menjadi dua kelompok, yang bagus dan yang biasa. Mereka yang terjaring ke dalam kelompok bagus disuruh mengulangi lagi duduk di Kelas 1 HIK, sedangkan mereka yang termasuk kelompok biasa naik ke Kelas 2 HKS. Kelak setelah duduk di Kelas 3 HKS, mereka dari kelompok biasa tadi dibagi menjadi dua lagi: yang dipandang cukup “baik” boleh terus naik ke kelas-kelas lebih tinggi selanjutnya, yaitu Kelas 4, Kelas 5. dan Kelas 6. Mereka yang tetap nampak biasa saja, dimasukkan ke kelas IV terminal, artinya Kelas IV yang tidak ada lanjutannya lagi, dan kemudian diberi ijazah *Kweekschool* (Buchori, 2009, hlm. 13).

Pembaharuan HKS menjadi HIK ini dilakukan, karena program pendidikan HKS dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Program HKS dipandang kuno

dan memerlukan penyegaran. Pendidikan di HKS terlalu menekankan penguasaan bahasa Belanda secara sempurna dengan mengorbankan kebutuhan akan pengetahuan umum sebagai bagian penting dari kesiapan menjadi guru yang kompeten. (Buchori, 2009, hlm. 14). Pada program HIK tekanan pada penguasaan bahasa Belanda ini dikurangi, dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan umum yang cukup luas. HIK juga memberikan ruang yang lebih luas kepada pelajaran matematika dan pengetahuan alam, lebih luas daripada yang diberikan oleh HKS. Dari peristiwa ini terlihat, pada tahun 1927 telah terjadi silang pendapat mengenai konsep kecakapan mengajar atau *teaching competence* (Buchori, 2009, hlm. 14).

Program sekolah guru (*Kweekschool*) di Bandung sebagai berikut

	Kelas		
	I	II	III
1. Bahasa Melayu	7	7	5
2. Bahasa Sunda	7	6	5
3. Menulis	4	3	2
4. Berhitung	7	7	6
5. Ilmu Ukur	2	2	2
6. Ilmu Bumi	3	4	5
7. Sejarah	1	2	3
8. Ilmu Alam	1	2	3
9. Menggambar	4	3	2
10. Ilmu Mendidik	-	-	3
11. Bernyanyi	1	1	1
Jumlah	37	37	37

Tahun ke-4 digunakan untuk praktek mengajar pada suatu sekolah "ekstern", yakni di luar sekolah guru. Di Bandung setiap calon guru belajar mengajar di tiap kelas selama dua minggu, dari kelas paling rendah sampai kelas tertinggi. Mereka yang tidak ikut praktek mengajar, mengikuti Pelajaran bersama dengan murid kelas III. Di Probolinggo calon guru tinggal selama satu minggu di sekolah ekstern sedangkan di Bukittinggi setengah dari murid berpraktek selama sebulan. Di Makassar

diadakan tiga hari untuk praktek mengajar, di Amboina satu minggu, di Padangsidempuan selama dua minggu (Nasution, 1983, hlm. 43).

Murid sekolah guru tinggal dalam asrama di bawah pengawasan yang ketat tentang kelakuan dan Pelajaran mereka. Mereka menerima f 12,- – f 15,- sebagai biaya untuk pakaian dan makanan. Murid kelas 3 atau 4 yang menunjukkan kelakuan yang baik diizinkan menikah, namun tidak mendapat kebebasan yang lebih banyak daripada murid lainnya. Mereka harus tetap tinggal dalam asrama seperti murid yang belum menikah. Lambat laun jumlah calon melebihi tempat yang tersedia, dan sejak 1871 diadakan ujian untuk memilih calon terbaik (Nasution, 1983, hlm. 43). Pada umumnya terdapat kekurangan buku di sekolah guru dan Pelajaran kebanyakan didasarkan atau kuliah dan dikte. Laboratorium dan alat-alat untuk Pelajaran fisika tak tersedia. Perpustakaan masih menyedihkan, gedung sekolah kurang Cahaya dan ventilasi, bocor dan tidak serasi pembuatannya. Dengan fasilitas demikian tak dapat diharapkan mutu pendidikan yang memadai (Nasution, 1983, hlm. 44).

#### 6. *Cursus voor Volksschool Onderwijzers* (CVO)

Hingga tahun 1941 terdapat kursus pendidikan guru Sekolah Desa (*Cursus Opleiding voor Volks Onderwyzer*, disingkat OVVO). Siswa OVVO dipersiapkan untuk menguasai pelajaran berhitung, menulis, membaca, menggambar, bernyanyi, dan bermain (olahraga, gerak badan, cara mengajar, dan budi pekerti/moral) untuk diajarkan kepada murid Sekolah Desa (Supriadi, 2002, hlm. 54-55). Untuk menjadi guru di SD dengan bahasa pengantar bahasa daerah (Jawa, Sunda, Melayu, atau Bugis) pada jenjang terendah terdapat program pendidikan yang disebut *Cursus voor Volksschool Onderwijzers* (disingkat CVO), yang kemudian disebut dengan nama *Opleiding voor Volksschool Onderwijzers* (disingkat OVVO). Program ini berupa kursus selama 2 (dua) tahun.

Yang diterima sebagai peserta kursus ialah mereka yang sudah tamat Kelas V dari Sekolah Pribumi Kelas II (*Tweede Inlandse School* atau *Vervolgschool* atau *Standaardschool*). Yang menjadi pengajar pada program ini ialah guru-guru SD yang dipandang sudah cukup berpengalaman. Metode pembelajaran yang dipakai ialah melihat dan meniru, yaitu menyaksikan bagaimana para guru senior mengajar, dan kemudian mereka menirukannya. Dengan meminjam kosakata modern metode pembelajaran di CVO/OVVO ini agaknya dapat disebut sebagai metode learning by doing. Acara pelajaran yang bersifat teoretik dapat dikatakan tidak ada. Setelah tamat dari pendidikan ini para siswa ditempatkan sebagai guru pada Sekolah Desa atau *Volksschool*, yaitu SD 3 tahun. Kurikulum pada sekolah ini sederhana sekali, yaitu membaca, menulis, dan berhitung (Buchori, 2009, hlm. 15)

Untuk guru Sekolah Angka 2 diadakan Kursus Guru Bantu (KGB) atau *Cursus voor Onderwijzer* (CVO). Kurikulumnya meliputi mata pelajaran Berhitung, Membaca, Menulis, Bahasa Daerah, Bahasa Melayu, Ilmu Hayat, Ilmu Alam, Etik, Bernyanyi, Olahraga, dan Ilmu Mendidik. Lama pendidikannya 3 tahun dan setelah lulus mendapatkan gaji 7,5 florijn/gulden per bulan. Lulusan yang mempunyai konduite baik dapat diangkat menjadi kepala *Vervolgschool* (Supriadi, 2002, hlm. 55).

## 7. *Normaalschool*

*Normaalschool* Negeri pertama untuk siswa laki-laki didirikan pada tahun 1915, sedangkan *Normaalschool* pertama untuk siswa perempuan didirikan pada tahun 1918. *Normaalschool* untuk laki-laki didirikan di Blitar, Padangpanjang, Jember, Garut, Jombang, dan Makassar. *Normaalschool* untuk siswa perempuan didirikan di Padangpanjang (1918), Blitar (1919), Tondano (1920), dan Salatiga (1933) (Buchori, 2009, hlm. 17). Pada jenjang lebih tinggi dalam jenis pendidikan

guru ini terdapat *Normaalschool* dengan lama pendidikan 4 (tahun). Yang dapat diterima sebagai murid pada sekolah ini ialah mereka yang sudah tamat Kelas V dari Sekolah Pribumi Kelas II, atau *Vervolg-school*, atau *Standaardschool*. Program pendidikan di *Normaalschool* meliputi 14 (empat belas) mata pelajaran, yaitu: Bahasa (bahasa-bahasa) Daerah; Bahasa Melayu; Ilmu Mendidik; Ilmu Hitung; Ilmu Bangun; Ilmu Tanam-tanaman; Ilmu Hewan; Ilmu Alam; Ilmu Bumi; Sejarah; Menggambar; Menulis; Menyanyi; Pendidikan Jasmani dan Permainan di luar sekolah (Buchori, 2009, hlm. 16).

*Normalschool* (NS) menerima siswa dari Sekolah Angka 2 atau SR 5-6 tahun dan lulusannya menjadi guru di Sekolah Desa atau di Sekolah Angka 2. Semua siswa tinggal di asrama. Siswa yang diterima adalah tamatan *Vervolgschool* yang lulus dalam ujian masuk. Setelah menyelesaikan sekolah ini, sebelum mengajar, para lulusannya harus juga memiliki sertifikat pertanian selama 6 bulan di Pancasan Bogor (sekarang Institut Pertanian Bogor, IPB). Apabila telah cukup berpengalaman dan menunjukkan prestasi yang baik sebagai guru kelas, guru lulusan sekolah ini dapat menjadi kepala sekolah di Sekolah Desa dengan gaji 25 gulden per bulan, bahkan tidak jarang yang diangkat menjadi penilik sekolah yang dalam bahasa Belanda disebut *Opziener* (Supriadi, 2002, hlm. 55).

Pada setiap *normaalschool* terdapat SD Pribumi Negeri sebagai tempat latihan mengajar (*leerschool*), Para siswa *normaalschool* diharuskan tinggal di asrama (*internaat*). Melalui kehidupan di *internaat* ini para siswa mendapat bimbingan dalam berbagai hal, dari kebiasaan belajar sampai ke cara berpakaian yang santun dan tatakrama waktu makan. Kehidupan di *internaat* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan menjadi guru yang baik, guru “profesional” menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada waktu itu. (Buchori, 2009, hlm. 17)

Program pendidikan untuk CVO/OVVO juga lebih sederhana daripada program pendidikan untuk *Normaalschool* karena kurikulum untuk SD tiga tahun jauh lebih sederhana daripada kurikulum untuk SD lima tahun. Misalnya, di CVO/OVVO dapat dikatakan tidak ada mata pelajaran untuk memperluas pengetahuan umum. Di *Normaalschool* masalah pemupukan pengetahuan umum ini merupakan hal yang penting. Mereka mendapat pelajaran dalam aljabar dan ilmu ukur bidang elementer, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah, dan pemahaman pasif Bahasa Belanda elementer (Buchori, 2009, hlm. 17-18).

## 8. Sekolah Guru Swasta

Sekolah-sekolah guru swasta hanya ada pada jenjang *Normaalschool* untuk pendidikan guru bagi SD dengan bahasa pengantar bahasa daerah, sedangkan pada jenjang CVO/OVVO tidak terdapat pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Untuk Sekolah Guru dengan program pendidikan Belanda, sejak semula terdapat sekolah-sekolah swasta. Jadi selalu ada *Kweekschool* swasta, HKS swasta dan HIK swasta. Pada akhir masa pendidikan, semua sekolah guru swasta harus mengikuti ujian negeri untuk menentukan kelulusan siswa-siswanya. Di antara sekolah-sekolah guru swasta ini ada yang mendapatkan bantuan (subsidi) dari Pemerintah Hindia Belanda, ada pula yang tidak (Buchori, 2009, hlm. 21).

Kolose Xaverius merupakan *kweekschool* swasta pertama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang mendidik calon-calon guru. Lulusan sekolah ini dipersiapkan untuk mendidik guru-guru untuk HIS. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Murid-murid lulusan Sekolah Kelas Dua yang belum pernah mempelajari bahasa Belanda harus masuk ke dalam kelas persiapan sebelum diterima di *kweekschool*. Lama mengikuti kelas persiapan adalah satu tahun (Asmi & Dhita, 2020, hlm. 69). Pada

sekitar tahun 1900an mulai banyak sekolah sekolah didirikan untuk mengatasi kekurangan tenagakerjaan. Kemudian tahun 1912 juga lahirlah *Kweekschool* Muhammadiyah sekolah guru yang berhaluan keagamaan Islam Muhammadiyah yang pada saat itu didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan khususnya yang terdapat di kota Yogyakarta (Dewi, 2019).

Ada empat HIK Swasta pada akhir zaman Hindia Belanda, yaitu (1) HIK Gunungsari di Lembang yang didirikan oleh Perguruan Neutrale Scholen, yaitu perguruan yang tidak terikat pada salah satu Gereja; (2) HIK Kristen di Solo, yang didirikan oleh Gereja Kristen Protestan; (3) HIK Katolik di Muntilan, yang didirikan oleh Gereja Katolik; dan (4) HIK Muhammadiyah di Solo dan Yogyakarta, yang didirikan oleh Perserikatan Muhammadiyah. HIK Gunungsari, HIK Kristen di Solo, dan HIK Katolik di Muntilan mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda, sedangkan HIK Muhammadiyah di Yogyakarta tidak mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda. Saya tidak tahu betul, bagaimana status HIK Muhammadiyah di Solo, menerima subsidi atau tidak. Saya kira sekolah ini mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda, karena gedung sekolahnya termasuk sangat mewah. Konon gedung ini adalah hibah dari Residen Surakarta (Buchori, 2009, hlm. 21-22).

Terutama dalam pengangkatan menjadi guru pada sekolah Pemerintah. Yang diutamakan ialah tamatan dari HIK Pemerintah, sedangkan pengangkatan sebagai guru untuk para tamatan HIK Swasta dianggap bukan tanggungjawab Pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini menimbulkan jurang yang cukup lebar dalam kesejahteraan hidup antara mereka yang diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan mereka yang harus atau memilih bekerja di sekolah-sekolah swasta. Guru yang diangkat Pemerintah Hindia Belanda mendapat gaji permulaan sebesar f 70.00 (tujuh puluh florins atau guldens). Sedangkan mereka yang bekerja

di sekolah-sekolah swasta pada umumnya mendapat gaji sekitar f 45 (empat puluh lima florin atau guldens), Perbedaan sebesar f 30,00 ini sangat berarti pada waktu itu, kalau diingat, bahwa harga beras pada waktu itu ialah sekitar f 8.00 sampai f 10.00/kwintal (100 kg). (Buchori, 2009, hlm. 22-23)

Pada tahun 1916 dibuka HKS (*Hogere Kweekschool*) yaitu sekolah guru yang lebih tinggi untuk mendidik guru HI. yang juga dapat mendidik guru Cina. Namun orang Cina sendiri akan merasakannya sebagai suatu kemunduran bila disatukan dengan calon guru Indonesia karena mereka berusaha mendapatkan status legal yang sama dengan bangsa Jepang yang dipersamakan haknya dengan orang kulit putih. Namun akhirnya dianggap bahwa pada hakekatnya orang Cina berbeda dengan Indonesia dan tidak akan aman bila dididik di bawah atap yang sama. Maka pada tahun 1917 didirikanlah HCK (*Hollands Chinese Kweekschool*) atau sekolah guru Cina di Meester Cornelis, Batavia (Nasution, 1983, hlm. 110). Penyediaan guru Cina pada prinsipnya bukan suatu usaha untuk menyesuaikan program sekolah dengan kebutuhan orang Cina melainkan untuk mendapatkan guru yang relative murah bagi HCS yang kian bertambah jumlahnya.

Selain sekolah, *Ksatrian Instituut* juga membuka Sekolah Pendidikan Guru. Sekolah itu dibuka pada tanggal 1 Agustus 1935 dengan tujuan untuk mencapai: (1) adanya tenaga-tenaga pengajar yang baik dan berspesialisasi; (2) terbentuknya dengan segera “balsa-tentara” guru; dan (3) pendidikan yang murah yang berarti keuntungan bagi negeri, gaji rendah, tempo yang lebih cepat untuk perluasan sekolah rakyat. Dengan beigtu dibuat dasar yang lebih luas bagi perkembangan bangsa (Lubis dkk, 2003, hlm. 59-60).

Dengan berlandaskan semboyan “untuk tiap-tiap desa sekolahnya sendiri” maka murid-murid pada sekolah guru *Ksatrian Instituut* dipersiapkan sebagai guru-guru bagi sekolah-sekolah swasta Indonesia. Untuk keperluan itu, kepada murid-murid diberikan pengetahuan

umum yang luas ditambah pengetahuan dagang dan berhubungan dengan Masyarakat. Guru-guru lulusan *Ksatrian Instituut* harus bersedia masuk ke pelosok-pelosok daerah dan mampu mendirikan sekolah di desa-desa. Sekolah guru itu memang telah direncanakan oleh *Ksatrian Instituut* dengan cukup matang dan merupakan salah satu reaksi terhadap *Wilde Scholen Ordennantie* yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 17 September 1932 (mulai berlaku pada 1 Oktober 1932) (Lubis dkk, 2003, hlm. 60).

## SIMPULAN

Sejak awal abad ke-19, tersedianya guru bagi sekolah-sekolah pribumi sudah menjadi perhatian Pemerintah Belanda. Pendidikan guru menjadi masalah penting yang diperhatikan pemerintah kolonial dalam upayanya untuk perluasan pendidikan. Pendirian sekolah-sekolah guru berjalan lambat akibat “sikap hati-hati” dan sekaligus “sikap setengah hati” Pemerintah Hindia Belanda. Pada awal pembentukan, kalangan Zending dan missionaris membuka Lembaga Pendidikan guru berupa kursus-kursus. Sekolah guru yang pertama kali didirikan oleh Belanda di Indonesia adalah *Kweekschool* di Surakarta, Jawa Tengah, pada tahun 1852.

Selain pendidikan guru yang bernama *kweekschool*, berdiri juga sekolah guru lainnya seperti: *Normaalschool* (sekolah guru dengan lama pendidikan 4 tahun dan menerima lulusan dari sekolah *Vervolg* atau Sekolah Kelas II), *Hogere Kweekschool* (HKS) yaitu sekolah guru dengan lama belajar 3 tahun, *Hollands Inlandsche Kweekschool* (HIK) untuk menggantikan HKS dengan lama pendidikan 6 tahun, *Hollands Chinese Kweekschool* (HCK) yaitu sekolah guru Cina yang sederajat dengan HIK, dan *Kursus Hoofdakte*.

Pemerintah Kolonial Belanda memerlukan tenaga kerja terutama guru dengan mendirikan *kweekschool*. Alasannya karena kesulitannya akseibilitas guru Eropa ke Hindia Belanda akibat perang dunia I dan II hingga dampak



depresiasi tinggi terhadap perekonomian Hindia Belanda, sehingga kekurangan dana untuk membawa tenaga kerja dari Eropa. Atas dasar permasalahan itu pembangunan *kweekschool* di Hindia Belanda dibentuk melalui intruksi Pemerintah Kolonial Belanda *kweekschoolplan* tahun 1927. *Kweekschoolplan* menjadi persetujuan pemerintah kolonial Belanda dalam menentukan arah kebijakan pendidikan guru di Hindia Belanda.

Guru-guru kebanyakan diambil dari orang golongan menengah dan rendah, para pedagang kecil dan petani. Mereka ini lebih suka mengajar di sekolah kelas satu daripada di sekolah kelas dua, karena mereka telah menerima dan hidup menurut norma-norma golongan menengah di *Kweekschool* maupun dalam pekerjaannya sebagai guru. Di samping itu perlu juga diingat, bahwa murid-murid CVO OVVO serta *Normaalschool* pada satu pihak, dan murid-murid *Kweekschool*-HKS-HIK pada pihak yang lain datang dari lapisan sosial yang berbeda-beda dalam masyarakat pribumi. Dengan demikian perbedaan dalam berbagai macam fasilitas antara berbagai jenis Sekolah Guru ini lalu menjadi faktor yang penting dalam munculnya iklim yang kurang sehat di kalangan guru-guru Indonesia pada waktu itu. Dapat dilaporkan dalam hubungan ini, dahulu kalau murid-murid CVO/OVVO dan *Normaalschool* pada umumnya datang dari keluarga-keluarga dalam masyarakat desa yang bukan priyayi, maka murid-murid *Kweekschool*-HKS-HIK datang dari keluarga priyayi atau priyayi kecil yang tinggal di ibu kota Kabupaten atau Residensi, seperti Tasikmalaya, Purwokerto, Madiun, dan Kediri.

Adanya perbedaan gaji dari masing-masing lulusan sekolah yang ada pada waktu itu, membuat guru-guru bumiputera berusaha untuk memperjuangkan nasibnya. Dwidjosewojo sebagai anggota Pengurus Besar Budi Utomo mulai memikirkan wadah perjuangan para guru dengan membentuk Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada akhir tahun 1911. PGHB yang anggotanya terdiri dari Guru Bantu, Guru Desa, Kepala

Sekolah, dan Penilik Sekolah mendapatkan badan hukum dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 18 Desember 1912.

## REFERENSI

- Alma, B. (2009). *Guru profesional: menguasai metode dan terampil mengajar*. Alfabeta
- Asmi, A. R., & Dhita, A. N. (2020). Pendidikan xaverius pada masa belanda di indonesia. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 2(1), 63-71.
- Atika, B. N., & Kusmarni, Y. (2017). Hubungan antara kompetensi guru dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah di sma negeri kota bandung. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 23-32.
- bin Ismail, M. Z., & bin Othman, M. K. (2021). amalan pedagogi abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih program ijazah sarjana muda perguruan (PISMP) pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia. *Jurnal Penyelidikan Dedikasi*, 13, 54-71.
- Brugmans, I.J. (1938). *Geschiedenis van het onderwijs in nederlandsch-indie*. Groningen: J.B. Wolters.
- Buchori, M. (2009). *Evolusi pendidikan di indonesia dari kweekschool sampai ke ikip: 1852-1998*. INSISTPress
- Coté, J. (1995). Imperialism and the progressive education movement: schooling in colonial sulawesi. *Paedagogica Historica*, 31(sup1), 253-277. doi:10.1080/00309230.1995.11434848
- Daele, H. V. (1973). De leesmethode van p. j. prinsen in vlaanderen. *Paedagogica Historica*, 13(1), 151-158. doi:10.1080/0030923730130108
- Depdikbud. (1976). *Pendidikan di indonesia 1900-1974*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dewi, P. S. (2019). Perkembangan *kweekschool* (sekolah guru) di yogyakarta tahun 1900-1927. *Ilmu Sejarah-S1*, 4(3).

- Djumhur, I dan H. Danasuparta. (1976). *Sejarah pendidikan indonesia*. Bandung: C.V. Ilmu
- Djojonegoro, W. (1997). *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan indonesia*. Depdikbud
- Efferi, A. (2015). Model pendidikan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. *QUALITY*, 3(2), 237-256.
- Ekajati, E. S., dkk. (1998). *Sejarah pendidikan daerah jawa barat*. CV Pialamas Permai
- Fatimah, S., & Firza, F. (2021). Guru dan kualitas pendidikan di indonesia masa kolonial dan pasca kemerdekaan. *Diakronika*, 21(2), 199-212.
- Hamid, A. (2017). Guru profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274-285.
- Hans, N. (1965). Holland in the eighteenth centuryverlichting(enlightenment). *Paedagogica Historica*, 5(1), 14-37. doi:10.1080/0030923650050102
- Harahap, A. M dkk. (2017). *Pendidikan di tapanuli bagian selatan: perjalanan panjang perubahan status ugn menjadi ptn*. Deepublish.
- Hardianto, D. (2009, November). Pendidikan guru dan upaya meningkatkan profesionalisme guru. In *Seminar nasional IPTPI (Vol. 1, pp. 1-10)*.
- Hasan, S.H. (2020). *Kurikulum smp: dari masa hindia belanda hingga kini*. UPI Press
- Irianto, Y. B. (2011). *Kebijakan pembaruan pendidikan: konsep, teori, dan model*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jakaria, Y. (2014). Analisis kelayakan dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan guru sekolah dasar dengan mata pelajaran yang diampu. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(4), 499-514.
- Jatirahayu, W. (2013). Guru berkualitas kunci mutu pendidikan. *Jurnal Ilmiah Guru Caraka Olah Pikir Edukatif*.
- Juhji, J. (2016). Peran urgen guru dalam pendidikan. *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 10(01), 51-62.
- Kurasawa (1991). *Jawa ni okeru Bunkyô no Gaikyô*.
- Makmur, Johat, et.al. (1993). *Sejarah pendidikan di indonesia zaman penjajahan*. Depdikbud
- Markum, M.E. (2007). *Pendidikan tinggi dalam perspektif sejarah dan perkembangannya di indonesia*. UI Press.
- Miarso, Y. (2008). Peningkatan kualifikasi guru dalam perspektif teknologi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 7(10), 66-76.
- Muchtar, O., dkk. (1994). *Meningkatkan peran ikip bandung dalam mensukseskan pembangunan pendidikan 40 tahun perkembangan ikip bandung 1954-1994*. UPI Press
- Mestoko, Sumarsono. (1979). *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman*. Depdikbud.
- Nafi'ah, U., Sapto, A., Sayono, J., & Herdiani, A. Peningkatan kapasitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis augmented reality untuk menyelaraskan pembelajaran sejarah dengan kebutuhan masa kini. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 5(1), 49-56.
- Nagazumi, Akira. (1983). *Bangkitnya nasionalisme indonesia: budi utomo 1908-1918*. Terjemahan KITLV. Jakarta:Grafiti
- Nasution, (1987). *Sejarah pendidikan indonesia*. Bumi Aksara.
- Nawi, N. H. M. (2012). *Islamisasi kurikulum pendidikan Islam di institusi pendidikan guru: tribulasi dan cadangan*.
- Penders, C. L.M. (1968). Colonial education policy and practice in indonesia: 1900-1942. *Thesis Ph.D. unpublished*. Canberra: Department of Pacific History, The Australian National University.
- Poerbakawatia, S. (1968). *Pendidikan dalam alam indonesia merdeka*. Gunung Agung.
- Purwianingsih, W., Rustaman, N. Y., & Redjeki, S. (2010). Pengetahuan konten pedagogi (pck) dan urgensinya dalam pendidikan guru. *Jurnal Pengajaran MIPA*, 15(2), 87-94.

- Raya, M. K. F. (2018). Sejarah orientasi pendidikan islam di indonesia (dari masa kolonial hingga orde baru). *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 228-242.
- Rifa'i, M. (2016). *Sejarah pendidikan nasional: dari masa klasik hingga modern*. Ar-Ruzz Media.
- Salsabilah, A. S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peran guru dalam mewujudkan pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7158-7163.
- Saripudin, D., Yulifar, L., Fauzi, W. I., & Anggraini, D. N. (2022). Pemanfaatan dan penggunaan e-book interaktif sejarah lokal jawa barat bagi guru-guru sma/smk melalui in/on training. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 5(2), 137-146.
- Setiawan, F. (2014). Kebijakan pendidikan Muhammadiyah terhadap ordonansi guru. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 47-70.
- Sjamsuddin, H., Sastradinata, K., Hasan, S.H. (1978). *Pendidikan di indonesia setelah kemerdekaan*. Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
- Supardan, D. (2008). Menyingkap perkembangan pendidikan sejak masa kolonial hingga sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis. *Generasi Kampus*, 1(2).
- Supriadi, D. (ed). (2002). *Guru di indonesia pendidikan, peltihan dan perjuangannya sejak zaman kolonial hingga era kemerdekaan*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Supriadi, D. (ed). (2003). *Guru di indonesia: pendidikan, pelatihan, dan perjuangannya*. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Kependidikan.
- Supriadi, D. (1999). *Mengangkat citra dan martabat guru*. Adicita Karya Nusa
- Supriadi, D. (2003). *Guru di indonesia: pendidikan, pelatihan, dan perjuangannya hingga era reformasi*. Depdiknas
- Suryadi. (2006). Vernacular intelligence: colonial pedagogy and the language question in minangkabau. *Indonesia and the Malay World*, 34(100), 315-344. doi:10.1080/13639810601130184.
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2018). Peran guru sejarah abad 21 dalam menghadapi tantangan arus globalisasi. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(1), 43-50.
- Sutamto, D.AAI-J. (1992). *Dwidjosewojo 1867-1943 tokoh pergerakan nasional pendiri bumiputera 1912*. Bumiputera
- Suwirta, A. (2006). Visi muhammad yamin dan sadarjoen siswomartojo tentang pentingnya pendidikan guru tingkat universitas di indonesia. *Historia: Journal of Historical Studies*, 5(2), 48-65
- Swennen, A., Volman, M., & van Essen, M. (2008). The development of the professional identity of two teacher educators in the context of Dutch teacher education. *European Journal of Teacher Education*, 31(2), 169-184. doi:10.1080/02619760802000180
- Yunus, M. Rusli, et.al. (2003). Perjalanan PGRI menyongsong kongres XIX PGRI di Semarang, 8-12 Juli 2003. PB PGRI dan Depdiknas
- Zainul, A., & Saripudin, D. (2004). 50 Tahun Jurusan pendidikan sejarah fpips, upi 1954-2004: mozaik pemikiran tentang sejarah, pendidikan sejarah, dan budaya. Historia Utama Press.
- Zainul, A. & Saripudin, D. (2006). Sejarah lembaga, profil, dan pemikiran para ketua jurusan pendidikan sejarah fpips di upi bndung, 1954-2006. *Historia: Journal of Historical Studies*, 5(2), 17-47

#### DOKUMEN

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan No 387421/Kab tanggal

- 1 September 1954 tentang Peraturan **SURAT KABAR**  
Tentang Pendidikan Tinggi Pendidikan Asia Raja, 10 Maret 1943  
Guru Darmo Kondo, Surakarta. 10 Oktober 1914).
- Ketetapan MWA UPI BHMN. (2010). Rencana **Harian Pikiran Rakjat** tanggal 21 Oktober 1954,  
Strategis (Renstra) Universitas Pendidikan 23 Sapar 1374  
Indonesia 2011-2015. **Pikiran Rakyat**, 10 Maret 2003.
- Dwidja Oetama, Yogyakarta, 1914, No. 8 **Suara Guru**, Oktober 1953.  
Kan Po No. 59 Tahoen ke III Boelan I-(2605).  
Collectie Tropen Museum